

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji Samekto, 2019, *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufentheorie Dalam Pendekatan Normatif Filosofis*, Jurnal Hukum Progresif, 7.(1).
- Carl J. Freidrich, 1988, *Man and His Government, An Empirical Theory of Politics*, dikutip dari Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta.
- E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Imam Sujono, 2019, *Perkembangan Teori Hukum Murni Di Indonesia*, Universitas Bhayangkara.
- Jose Antonio Cheibub, 2017, *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy dalam Fitra Arsil. Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Kementerian Keuangan RI, 2020, *Pokok-Pokok APBN 2020: Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Kementerian Keuangan RI.
- Lawrence Friedman, 1984, *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces Of The Law, And How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, W.W. Norton & Company, New York.
- Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju Bandung.
- Maria Farida Indrati S, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan 2 -Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, Depok.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius Yogyakarta.
- Mochtar Kusuma-atmadja, 1929, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangun-an Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, P.T.Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusuma-atmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, Bandung.
- Moh. Hasan Wargakusumah dalam Novianti, 2012, *Analisis Terhadap Pembuatan Perjanjian Kerjasama Internasional (Studi di Provinsi Bali)*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta.
- Munir Fuady, 2011, *Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Kencana, Jakarta.

- Nur A Fadhil Lubis, 1995, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Widya Sarana, Medan.
- Oktaviani.J, 2018, *Teori Trias Politica (Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan) Pemisahan, Sereal Untuk*.
- Pamudji, 1985, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina Askara, Jakarta.
- Paskah Suzetta, 2007, *Perencanaan Pembangunan Indonesia*, Bappenas 20 No. 2.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet. VI, Yogyakarta.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2011, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta.
- Shidarta, 2012, *Posisi Pemikiran Teori Hukum Pembangunan Dalam Konfigurasi Aliran Pemikiran Hukum*, Epistema Institut & HumaJakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tedi Priatna, 2017, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, CV. Insan Mandiri, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara Nusantara.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Lampiran II Undang- Undang No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengenai Rencana Induk Ibu Kota Negara.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Jurnal

- Ade Reza Hariyadi, 2021, *Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia*, JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik, 2.2, hlm. 259–76. <<https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>>.
- Aris Irawan, 2019, *Hukum Islam Dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Al-Hurriyah, Vol.04., No.02. Juli-Desember, hlm 99.
- Badan Pusat Statistik, 2020, *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*, hlm. 12.
- Bappenas RI, 2005, *Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005-2025*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hlm.10.
- Bappenas, 2022, Laporan Rencana Induk IKN dan Lampiran UU IKN.
- Clara Amanda Musu, Dkk, 2022, *Undang-Undang Ibu Kota Baru: Perdebatan Kecacatan Formil dan Materiil Pada Aturannya*, IBLAMLawReviewVol.2No.02, hlm. 89.
- Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 4, Nomor 1 Februari, Hlm. 119.
- Dian Herdiana, 2020, *Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara*, Jurnal Politica 11, no. 1: 1-18. <http://dx.doi.org/10.22212/jp.v11i1.1382>.
- Doni Nugroho, 2022, *Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, The Indonesian Journal of Politics and Policy, hlm. 53–62. <<https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>>.
- Ervin Nugrohosudin, 2022, *Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara*, Jurnal Legislatif, hlm. 79–90. <<https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002>>.
- Fikri Hadi and Ristawati Rosa, 2020, *Pemindahan Ibu Kota Indonesia Dan Kekuasaan Presiden Dalam Perspektif Konstitusi The Relocation of Indonesia ' s Capital City and the Presidential Powers in Constitutional Perspective*, Jurnal Konstitusi, hlm. 530–37. <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1734/pdf>>.
- Hamdani, R. S., 2020, *Proyek lintas batas administrasi: Analisis partisipasi publik dalam proses perencanaan ibu kota negara Republik Indonesia*, Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Vol. 4, No. 43
- Hariati, Annisa Saskia Saputri, 2022, *Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (Ikn) Di Kalimantan Timur, Indonesia*, Journal of Government and Politics(JGOP)Vol. 4 No. 1 Juli, hlm. 19.
- Imam Sukadi, 2021, *Sistem Pemerintahan Indonesia dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 4, Nomor 1 Februari, hlm. 119
- Kementerian Keuangan RI, 2020, *Pokok-Pokok APBN 2020: Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi dan Penguatar Kualitas Sumber Daya Manusia*, Kementerian Keuangan RI.

- M. Zulfa Aulia, 2018, *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1 No. 2, Hlm, 377.
- Muhammad E Kusuma and Lutfi Muta'ali, 2019, *Hubungan Pembangunan Infrastruktur Dan Perkembangan Ekonomi Wilayah Indonesia*, Jurnal Bumi Indonesia, hlm.35.
- Nasichin, Any Farida, 2018, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori- Teori Hukum di Indonesia (Teori Hukum Pancasila sebagai Perwujudan Teori Hukum Transdental)*, Jurnal Hukum Transdental, hlm. 25.
- Nyimas Latifah Letty Aziz, 2020, *Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain*, Jurnal Kajian Wilayah, hlm. 37. <<https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.827>>.
- Reni Ria Armayani Hasibuan and Siti Aisa, 2020, *Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia*, AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, hlm.183. <<https://doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>>.
- Rianda Dirkareshza, 2022, *Synchronising the Implementation of Simultaneous General Elections with the National Development Planning*, hlm. 1-18. <<https://doi.org/https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2087992/v1>>.
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, hlm. 7.
- RR. Lyia Aina Prihardiati, 2021, *Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Solen*, Jurnal Hermeneutika Vol. 5, No. 1, Februari, Hlm. 86.
- Siaran Pers. (2022). Bappenas Tekankan Tujuan Besar IKN Untuk Mewujudkan Visi Indonesia 2045, Kementerian PPN/ Bappenas.
- Suhartono, 2011, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 94.
- Veri Junaidi dan Viola Reininda, 2020, *Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai*, Jurnal Jentera Volume 3 No 1, hlm.219.
- Yahya, H. M, 2018, *Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 14, No.1
- Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, and Verrence Wibowo, 2022, *Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, Vol 5 No.2* .
- Yesi Anggraini, Armen Yasir, dan Zulkarnain Ridlwan, 2015, *Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang - Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia Vol 9 No. 1 <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no1.589>

Sumber Lainnya

[10 Negara Sukses Memindahkan Ibu Kota Negara \(sindonews.com\)](https://www.sindonews.com) diakses pada tanggal 27 Desember 2022

- [11 Negara yang Pernah Pindah Ibu Kota Beserta Penjelasannya - IlmuGeografi.com](#). diakses pada tanggal 27 Desember 2022
- [5 Alasan Untuk Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara - Kompasiana.com](#), diakses pada tanggal 3 Oktober 2022
- [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](#) Diakses 3 Januari 2023
- [Bappenas Beber Revisi UU IKN Nusantara Perkuat Kewenangan Otorita di 6 Sektor Ini - Tribunkaltim.co \(tribunnews.com\)](#) Diakses pada tanggal 4 Januari 2023.
- [Bappenas, “IKN Ruang Besar Investasi Jangka Menengah dan Panjang”, Bappenas : IKN ruang besar investasi jangka menengah dan panjang](#), diakses pada tanggal 26 September 2022
- [Bappenas: Pemindahan Ibu Kota Negara RI masuk RPJMN 2020-2024 - ANTARA News](#) Diakses pada tanggal 28 Desember 2022.
- [Canberra Residents are the Happiest in the Country \(realestate.com.au\)](#) diakses pada tanggal 27 Desember 2022
- [Daftar Negara Gagal dan Berhasil Pindahkan Ibu Kota | Tagar](#), Diakses pada tanggal 27 Desember 2022
- [Deretan Negara yang Dinilai Gagal Memindahkan Ibu Kota – Riaunews](#) Diakses pada tanggal 27 Desember 2022
- [DPR Setujui Revisi UU IKN, Apa yang Diubah? \(idntimes.com\)](#). Diakses pada tanggal 28 Desember 2022.
- <https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/datapaparans/March2022/c9IVSaQqMG-EtSOKMiVvt.pf> Diakses pada tanggal 4 Januari 2023
- <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/dampak-pemindahan-ibu-kota-negara-terhadap-pengembangan-kompetensi-aparatur-sipil-negara/>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2022
- <https://www.bappenas.go.id/berita/bappenas-tekanan-tujuan-besar-ikn-untuk-mewujudkan-visi-indonesia-2045-q6ojv>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022
- <https://www.bisnisbandung.com/nasional/pr-3982946299/cacat-formil-uu-ikn-digugatpara-pakar-ke-mk-tak-merepresentasikan-asas-keterbukaan> Diakses pada tanggal 28 Desember 2022
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220217192145-4-316307/jokowi-beri-green-light-simak-timeline-pembangunan-ikn>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022
- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-RJ-20211215-041724-6529.pdf> Diakses pada tanggal 25 Desember 2022
- <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/4274/ikn-nusantara-awal-peradaban-baru-indonesia?lang=1>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022
- <https://www.pu.go.id/berita/transformasi-menuju-indonesia-maju-menteri-pupr-pembangunan-ikn-usung-konsep-future-smart-forest-city>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2022
- [Ibu Kota Myanmar dan Cerita di Balik Pemindahannya \(detik.com\)](#) diakses pada tanggal 27 Desember 2022
- [Ini Alasan IKN Baru Diberi Nama Nusantara \(kompas.com\)](#) Diakses pada tanggal 4 Oktober 2022

[Ini Konsep Pemindahan Ibu Kota dari Era Soekarno Hingga Jokowi \(idntimes.com\)](#), diakses pada tanggal 3 Oktober 2022

[Jokowi: SBY Juga Mengkaji Pemindahan IKN - Nasional Tempo.co](#), diakses pada tanggal 18 Desember 2022.

[Ketua MPR: Pemindahan IKN Tak Boleh Berhenti karena Ganti Pemimpin \(tirto.id\)](#) diakses pada tanggal 18 Desember 2022

[MASUKAN TERHADAP RUU IBUKOTA NEGARA \(IKN\) \(dpr.go.id\)](#) Diakses pada tanggal 4 Januari 2023

[Pembangunan IKN Berdampak pada Pemerataan Kesejahteraan Nasional \(mediaindonesia.com\)](#). Diakses pada tanggal 30 Desember 2022

[PEMILU DAN MASA DEPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.pdf \(bappenas.go.id\)](#) Diakses pada tanggal 4 Januari 2023

[Pemindahan Ibu Kota Negara: Gagasan Soekarno, Mimpi Soeharto, dan Upaya Jokowi Halaman all - Kompas.com](#), diakses pada tanggal 4 Oktober 2022

[Pindah Ibu Kota, Butuh Berapa Lama? | Indonesia Baik Baik](#) diakses pada tanggal 26 September 2022

[Pindah Ibu Kota? Mari Kita Tilik Pengalaman Kazakhstan | kumparan.com](#) Diakses pada tanggal 27 Desember 2022

[SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL \(SPPN\) - Bagian Perencanaan \(ipdn.ac.id\)](#) Diakses pada tanggal 4 Januari 2023

[Softbank Mundur Sebagai Investor IKN, Pemerintah Klaim Masih Banyak Investor Lain Tertarik \(voaindonesia.com\)](#). Diakses pada tanggal 4 Januari 2023

[Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara \(kemenkeu.go.id\)](#), diakses pada tanggal 26 September 2022